

Perencanaan Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Kerinci Seblat (Intervensi Proses Kebijakan Deliberatif)

oleh

Andi Fernandes¹, San Afri Awang², Lies Rahayu Wijayanti Faida²

INTISARI

Kemitraan konservasi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan kelompok masyarakat bertujuan untuk menyeimbangkan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan kemitraan ini masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kemitraan, mengkaji proses perencanaan, serta merumuskan strategi berbasis kebijakan deliberatif untuk meningkatkan kemitraan antara TNKS dan KTH. Pendekatan kebijakan deliberatif dipilih karena dianggap mampu memperbaiki proses ini melalui perencanaan yang menekankan kesepakatan bersama, keselarasan persepsi, serta tujuan yang jelas dengan melibatkan partisipasi aktif dan komunikasi terbuka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada kemitraan di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Kayo Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam secara semi-terstruktur untuk menggali dinamika proses perencanaan dan keterlibatan masyarakat. Kebijakan deliberatif digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kemitraan konservasi dan menilai proses penyusunan perencanaan, dan analisis SWOT dan QSPM untuk menentukan strategi pendekatan deliberatif dalam memperbaiki kemitraan konservasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan dipengaruhi oleh bentuk partisipasi, dinamika sosial, manfaat ekonom, dan dukungan pemerintah daerah dan koordinasi para pihak. Dari keempat faktor tersebut partisipasi merupakan faktor yang paling mempengaruhi. Proses perencanaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip kebijakan deliberatif. Rekomendasi strategi yang dihasilkan merupakan mendukung strategi *turn-around*, meliputi peningkatan partisipasi inklusif, penguatan kolaborasi, monitoring dan evaluasi yang terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas kemitraan, pendampingan berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi alternatif.

Kata Kunci: kemitraan konservasi, kebijakan deliberatif, TNKS, partisipasi

¹Mahasiswa Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, UGM

²Dosen Pengajar Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, UGM

***Conservation Partnership Planning in Kerinci Seblat National Park
(Intervention of the Deliberative Policy Process)***

by

Andi Fernandes¹, San Afri Awang², Lies Rahayu Wijayanti Faida²

ABSTRACT

The Conservation partnerships in Kerinci Seblat National Park (KSNP) with community groups aim to balance environmental preservation with improving community welfare. However, the implementation of these partnerships faces several challenges that affect its success. This study aims to identify and explain the factors influencing the success of these partnerships, examine the planning process, and formulate deliberative policy-based strategies to enhance collaboration between TNKS and Forest Farmer Groups (KTH). A deliberative policy approach was selected for its potential to improve the planning process by emphasizing mutual agreements, aligned perceptions, and clear objectives through active participation and open communication.

This research employs a case study method focusing on the partnership in Giri Mulyo Village, Kayo Aro Barat Subdistrict, Kerinci Regency. Data were collected through literature reviews and semi-structured in-depth interviews to explore the dynamics of the planning process and community involvement. Deliberative policy served as the analytical framework to evaluate the factors influencing the success of conservation partnerships and assess the planning process. Additionally, SWOT and QSPM analyses were applied to develop deliberative policy approach strategies for improving the partnerships.

The research findings reveal that the success of conservation partnerships is influenced by the forms of participation, social dynamics, economic benefits, program sustainability, local government support, and stakeholder coordination. Among these factors, participation plays the most significant role. The planning process has not yet fully adopted the principles of deliberative policy. The recommended strategies align with a turn-around approach, focusing on enhancing inclusive participation, strengthening collaboration, ensuring continuous monitoring and evaluation to improve partnership effectiveness, providing sustained assistance, and fostering the development of alternative economic opportunities.

Keywords: conservation partnership, deliberative policy, TNKS, participation

¹Master of Forestry Science Student, Faculty of Forestry, UGM

²Lecturers, Master of Forestry Science, Faculty of Forestry, UGM